



**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)
TAHUN 2024**



GUGUS KENDALI MUTU

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA**

2024

**LAPORAN
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)**

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TAHUN 2024



**BERDASARKAN
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2024**

**GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit Mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu yang ingin dicapai dan tertuang dalam Dokumen Mutu SPMI. Posisi AMI dalam siklus SPMI (sekarang PPEPP) berada pada bagian Evaluasi yang merupakan bagian sangat penting dilakukan secara periodik dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian dan peningkatan standar yang terus-menerus terjadi. Undiksha sebagai Perguruan Tinggi yang mengutamakan terjaminnya mutu juga melaksanakan AMI secara periodik setiap tahunnya. Pimpinan Undiksha memastikan bahwa penetapan proses AMI berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan SPMI yang ada.

Selain itu, salah satu sasaran dari aktivitas pengimplementasian SPMI di Undiksha adalah untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan harapan tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja khususnya ditingkat satuan kerja akademik (program studi) melalui Audit Mutu Internal Akademik (AMI-Akademik). Audit Mutu Internal Akademik di Universitas Pendidikan Ganesha dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM) Undiksha. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan AMI-Akademik secara bertahap dan sistematis. AMI-Akademik dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja Program Studi yang ada di lingkungan Undiksha.

Temuan AMI-Akademik Undiksha tahun 2024 dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu: (1) Mencapai Standar; (2) Melampaui Standar; (3) Belum Mencapai; dan (4) Menyimpang. Untuk temuan yang mencapai dan melampaui standar, maka standar tersebut dipertahankan dan bahkan ditungkatkan. Namun, untuk kategori yang belum mencapai dan/atau menyimpang diperlukan **tindakan koreksi**. Selanjutnya, untuk temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar tersebut dikategorikan menjadi

Observasi (OB) atau Ketidaksesuaian (KTS), dimana KTS merupakan kategori temuan yang belum mencapai, menyimpang dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi dan OB merupakan temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang segera dapat diperbaiki.

Ketidaksesuaian dan/atau observasi tersebut selanjutnya perlu adanya tindakan koreksi dalam bentuk permintaan tindakan koreksi kepada Auditi (dalam hal ini Prodi). Permintaan perbaikan kepada Auditi atas dasar laporan audit agar Auditi menghilangkan KTS/OB atau penyebab dari KTS/OB tersebut. Tindakan koreksi merupakan tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan hal-hal tersebut untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tindakan koreksi ini dirumuskan dalam **Rapat Tinjauan Manajemen** (RTM) untuk membahas hasil AMI-Akademik Undiksha Tahun 2024. RTM adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan, dipimpin langsung oleh pimpinan, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen yang ada di lingkungan Undiksha, termasuk Auditi dan Auditor AMI-Akademik Undiksha Tahun 2024.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan sampai dengan pelaksanaan RTM dan Rencana Peningkatan Standar ini, Jurusan/Prodi akan dapat mengetahui potret dirinya, baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, kemudian memperbaiki kinerjanya sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam akreditasi. Selain itu, evaluasi ini juga sebagai wujud penerapan konsep perbaikan kualitas secara terus-menerus (*continuous quality improvement*) dapat dijadikan pegangan dalam memberikan layanan akademik yang lebih baik dan profesional.

1.2 Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Audit Mutu Internal Akademik merupakan suatu kegiatan untuk menjamin mutu yang dilakukan secara internal perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pencapaian standar yang ditetapkan. Beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya AMI-Akademik adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- 6) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Jurusan/Prodi.
- 8) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 9) Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi.
- 10) Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.

1.3 Tujuan Rapat Kegiatan

Tujuan umum RTM Undiksha Tahun 2024 adalah membahas dan menyusun kebijakan dan/atau tindakan sistem manajemen dan pelayanan institusi untuk memastikan kesesuaian, kecukupan serta keefektifan manajemen mutu berjalan secara konsisten. Tujuan khusus RTM Undiksha Tahun 2024 adalah membahas tindak lanjut temuan AMI- Akademik Undiksha Tahun 2023. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI-Akademik dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem penjaminan mutu, termasuk kebijakan dan sasaran mutu.

1.4 Lingkup Bahasan

Mengacu pada aspek Evaluasi dalam Siklus PPEPP dari SPMI, maka FMIPA Undiksha melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut.

1. Hasil audit, meliputi temuan-temuan dalam AMI-Akademik Undiksha 2024 dari program studi D3, S1, S2, dan S3 di lingkungan Undiksha.
2. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap budaya mutu dan suasana akademik.
3. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan perkuliahan.
4. Tingkat kepuasan dosen terhadap layanan administrasi.
5. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.
6. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program studi dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
7. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).
8. Perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu (baik internal maupun dari eksternal).

BAB II

TEMUAN HASIL AMI-AKADEMIK

2.1 Temuan Audit pada AMI-Akademik FMIPA Undiksha Tahun 2024

Tabel 1. Temuan-Temuan Audit pada Prodi di FMIPA

No.	Temuan Audit	Prodi
A. Bidang Pendidikan		
1	Belum semua mata kuliah mengadopsi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan Biologi, Budidaya Kelautan
2	Pemutakhiran kurikulum belum melibatkan review dari pakar bidang ilmu prodi.	Akuakultur, Budidaya Kelautan
3	Belum tersedia sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik.	Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
4	Belum ada kebijakan syarat tambahan kelulusan wajib mencapai nilai TOEFL 450 dan wajib mempublikasi karya tugas akhir / skripsi pada jurnal terakreditasi minimal sinta 6 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal seminar nasional.	Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
5	Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi nasional dan internasional belum mencapai standar di atas 50%.	Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
6	Secara umum selama 1 tahun terakhir DTPS belum pernah tes TOEFL, sehingga belum bisa menentukan berapa skor TOEFLnya.	Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
7	Rendahnya persentase DTPS yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru besar.	Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Analis Kimia, Budidaya Kelautan

No.	Temuan Audit	Prodi
8	Rendahnya presentase mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya belum mencapai 10%	Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
9	DTPS memiliki publikasi sebagai penulis pertama (di bawah target 50%).	Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Budidaya Kelautan
B. Bidang Penelitian		
10	Prodi belum memiliki peta jalan dan renstra penelitian	Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Budidaya Kelautan
11	Prodi belum melakukan monev peta jalan penelitian	Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
12	Belum ada keterlibatan pihak industri dalam penelitian	Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Budidaya Kelautan
C. Bidang PkM		
13	Prodi belum memiliki peta jalan dan renstra PkM	Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Budidaya Kelautan
14	Prodi belum melakukan monev peta jalan penelitian	Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
D. Tambahan (Visi misi, Tata Pamong, Mahasiswa, dan Luaran)		
15	Renstra prodi belum ada. Renstra yang dijadikan dasar dalam evaluasi diri prodi adalah Renstra Fakultas.	Akuakultur, Biologi, Pendidikan Biologi, Budidaya Kelautan
16	SPMI belum berjalan dengan optimal yang memenuhi 4 aspek tersebut. Hal-hal yang sudah tersedia sebatas: (1) unsurpelaksana penjaminan mutu dalam bentuk GKM Fakultas, (2) dokumen standar mutu SPMI Fakultas, (3) siklus SPMI yang berjalan baru penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perlu upayalebih optimal untuk SPMI ke depannya.	Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
17	Rendahnya jumlah kegiatan kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan Program Studi	Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Budidaya Kelautan
18	Terjadi penurunan pendaftar, yang berdampak pada penurunan perolehan mahasiswa baru.	Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan Biologi, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
19	Tidak ada mahasiswa asing.	Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Kimia, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
20	Tidak ada luaran penelitian/PkM mahasiswa yang memperoleh HKI .	Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Analis Kimia, Budidaya Kelautan
21	Rendahnya karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba, minimal 1 karya/tahun	Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Akuakultur, Biologi, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Budidaya Kelautan

Berdasarkan Tabel, terlihat bahwa pada FMIPA ditemukan sebanyak 21 temuan audit yang secara umum tersebar pada 11 prodi yang ikut AMI-Akademik tahun 2024. Adapun temuan yang mayoritas terdapat pada sebagian besar prodi di FMIPA adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemanfaatan E-learning dalam proses pembelajaran pada Mata kuliah di masing-masing prodi. Tindak lanjutnya, mewajibkan dosen pengampu untuk memanfaatkan e-learning dalam perkuliahan, minimal memuat 3 (tiga) aktivitas. Lebih lanjut, memfasilitasi dosen dalam workshop penguatan pemanfaatan e-learning untuk Dosen.
2. Belum konsistennya pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten diawal, pertengahan dan akhir semester. Serta belum tervalidasinya instrument monitoring dan evaluasi yang digunakan.
3. Belum adanya dokumen kebijakan syarat tambahan kelulusan seperti misalnya mahasiswa wajib mempublikasi karya tugas akhir pada jurnal terakreditasi minimal sinta 4 dan/ atau pada pertemuan ilmiah minimal seminar internasional, sebagai pembicara.
4. Belum optimalnya DTSPS yang memiliki sertifikat kompetensi atas keilmuan/keterampilan yang dimiliki di tingkat nasional/internasional.
5. Belum terdapat peta jalan penelitian yang dituangkan pada renstra penelitian.
6. Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi
7. Belum adanya keterlibatan industri dalam pelaksanaan penelitian.
8. Belum adanya peta jalan PkM yang dituangkan pada renstra pengabdian.
9. Belum adanya monev terhadap kesesuaian peta jalan PkM yang dirumuskan dengan PkM yang ada di prodi.
10. Banyaknya kegiatan kerjasama tingkat internasional dalam 1 tahun terakhir yang melibatkan prodi masih kurang.
11. Implementasi SPMI belum berjalan dengan optimal yang memenuhi 4 aspek tersebut. Hal-hal yang sudah tersedia sebatas: (1) unsur pelaksana penjaminan mutu dalam bentuk GKM Fakultas, (2) dokumen standar mutu SPMI Fakultas, (3) siklus SPMI yang berjalan baru penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perlu upaya lebih optimal untuk SPMI ke depannya.
12. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap mahasiswa aktif belum terpenuhi, karena belum ditindaklanjuti rencana sosialisasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri.

13. Belum optimalnya dilakukannya 6 pengukuran kepuasan layanan.
14. Renstra prodi belum ada, untuk sementara renstra yang dijadikan dasar dalam evaluasi diri prodi adalah Renstra Fakultas.
15. Terjadi penurunan pendaftar, yang berdampak pada penurunan perolehan mahasiswa baru.
16. Persentase jumlah sks perkuliahan di luar prodi masih kurang.
17. Presentase mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya belum mencapai standar minimal.
18. Karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba masih kurang.
19. Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna atau pun buku ber-ISBN belum terpenuhi.

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN AUDIT

Terdapat temuan hasil audit di FMIPA Undiksha yang secara umum tersebar pada 11 prodi yang ikut AMI-Akademik tahun 2024. Dari temuan tersebut, perlu dilakukan upaya tindakan perbaikan dan strategi mulai dari di level program studi, fakultas dan Universitas, sehingga tidak menjadi temuannya berulang-ulang tanpa adanya progress tindak lanjut. Berdasarkan hasil RTM antara Pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan/Direktur Pasca, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Koorprodi, Kepala Unit), Personalia PJM, GKM Fakultas/Prodi, Auditor, Auditi, dan Panitia Pelaksana didapatkan solusi sebagai bentuk tindakan koreksi dari temuan-temuan audit tersebut. Tabel 3.1 berikut mendeskripsikan rekomendasi rencana tindak lanjut untuk penanganan temuan-temuan audit pada prodi untuk selanjutnya diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pengampu kepentingan yang ada di lingkungan Undiksha sebagai upaya proses perbaikan.

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
A.	Bidang Pendidikan dan Pengajaran		
1.	Masalah: Monev proses pembelajaran belum dilaksanakan secara berkala dan sistematis oleh unit yang independen. Akar Masalah: Keberadaan GKM Fakultas/ Pasca/ Prodi belum berfungsi dengan baik dalam mengevaluasi standar-standar yang ditetapkan (khususnya dalam proses pembelajaran).	1. Pimpinan mengaktifkan keberadaan unit pelaksana penjaminan mutu pada setiap Aras (universitas, fakultas, prodi). 2. Disusun tupoksi yang jelas antara GKM fakultas dan GKM Prodi. 3. GKM menyusun Dokumen SPMI, dan melakukan evaluasi secara berkala, khususnya pada bidang pembelajaran. 4. Pemberian grade pada sistem Remunerasi untuk pengelola GKM Fakulta/Prodi.	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Ka LPPPM 4. Wakil Dekan 1 5. Wakil Direktur 1 6. Kepala PJM 7. Ketua GKM 8. Tim Remunerasi 9. Koorprodi
2.	Masalah: Belum semua MK memanfaatkan hasil penelitian/PkM dalam pelaksanaan pembelajaran. Akar Masalah: Secara umum Dosen belum mengintegrasikan hasil penelitian/PkM ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi perkuliahan.	1. Pelatihan dan workshop pengintegrasian hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran. 2. Dosen menyusun perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, dan dimonev secara intensif oleh GKM-Fakultas/Pasca. 3. Pimpinan mewajibkan dosen untuk menjadikan pemanfaatan hasil penelitian/PkMnya sebagai	1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPPM 3. Ka LPPM 4. Wakil Dekan I 5. Wakil Direktur I 6. Kapus Penelitian 7. Kapus PkM 8. Ketua Jurusan 9. Koorprodi

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
		salah satu output, serta menjadi syarat pendanaan proposal selanjutnya.	
3.	Masalah: Prodi belum mensyaratkan kelulusan mahasiswa dengan syarat tambahan pemenuhan nilai TOEFL. Akar Masalah: Lembaga belum menetapkan kebijakan pemenuhan syarat TOEFL untuk kelulusan.	1. Pimpinan mengkaji lebih jauh terkait pentingnya persyaratan TOEFL untuk kelulusan mahasiswa. 2. Pimpinan membuat tim penyusun kebijakan tersebut. 3. Pimpinan menetapkan kebijakan pemenuhan syarat TOEFL untuk kelulusan mahasiswa. 4. Memfasilitasi mahasiswa dalam peningkatan kompetensi bahasa inggris melalui UPT-Bahasa, serta memfasilitasi pelaksanaan tesnya.	1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPPM 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Direktur I 5. Ka UPT-Bahasa 6. Ketua Jurusan 7. Koorprodi
4.	Masalah: Sebagian besar dosen belum memiliki dokumen peningkatan kompetensi bahasa inggris (TOEFL) secara berkala. Akar Masalah: Lembaga belum menetapkan kebijakan terkait peningkatan bahasa inggris dosen secara berkala dalam bentuk tes TOEFL.	1. Pimpinan mengkaji lebih jauh terkait pentingnya tes TOEFL dosen secara berkala. 2. Pimpinan membuat tim penyusun kebijakan tersebut. 3. Pimpinan menetapkan kebijakan pemenuhan syarat TOEFL untuk dosen secara berkala. 4. Memfasilitasi dosen dalam peningkatan kompetensi bahasa inggris melalui UPT-Bahasa, serta memfasilitasi pelaksanaan tesnya.	1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPPM 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Direktur I 5. Ka UPT-Bahasa 6. Ketua Jurusan 7. Koorprodi
5.	Masalah: DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi atas keilmuan/keterampilannya di tingkat nasional dan/atau internasional sangat kurang. Akar Masalah: kebanyakan DTPS belum mengetahui lembaga yang mengeluarkan sertifikat yang sesuai dengan keilmuannya.	1. Lembaga memotivasi dan memfasilitasi dosen dalam memperoleh sertifikat keilmuan yang sesuai dengan prodinya. 2. Lembaga membentuk tim untuk memfasilitasi dosen dalam memperoleh informasi, pemetaan lembaga yang dituju untuk mendapatkan sertifikat keilmuan/keterampilannya. 3. Memberikan bantuan dana kepada dosen dalam pendftaran atau tes dalam mendapatkan sertifikat ini.	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Ka LPPPM 4. Wakil Dekan I 5. Wakil Direktur I 6. Ketua Jurusan 7. Koorprodi
6.	Masalah: Beberapa Prodi memiliki rata-rata mahasiswa PA setiap dosen melebihi batas maksimal jumlah mahasiswa Akar Masalah: Jumlah dosen masih kurang.	1. Pimpinan melakukan <i>mapping</i> kebutuhan dosen di Prodi. 2. Lembaga melakukan rekrutmen dosen pada prodi yang masih kurang jumlah dosen.	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Dekan II 5. Wakil Direktur I 6. Wakil Direktur II 7. Kejur 8. Koorprodi 9. Dosen PA

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
7.	<p>Masalah: DTPS yang memeliki jabatan fungsional Guru Besar/Lektor Kepala masih kurang. Akar Masalah: Tidak sedikit dosen di Undiksha tergolong baru (masa kerja sedikit) dan bahkan masih CPNS, serta kendala publikasi artikel di jurnal Internasional bereputasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perlu direncanakan dalam Renstra maupun Renop PS untuk mendorong dosen-dosen mengajukan LK atau GB. Lembaga memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat yang diperlukan dosen untuk pemenuhan angka kredit ke Lektor Kepala/Guru Besar, misal publikasi artikel, HaKI, penulisan buku, dll. 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor II Dekan/Direktur Wakil Dekan II Wakil Direktur II Ketua Jurusan Koorprodi Tim Restra/Renop Dosen
8.	<p>Masalah: DTPS yang bergelar Doktor masih kurang. Akar Masalah: Tidak sedikit dosen di Undiksha tergolong baru (masa kerja sedikit) dan bahkan masih CPNS, terkendala pada beasiswa, serta dosen-dosen tersebut di beberapa prodi dibutuhkan keberadaannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perlu direncanakan dalam Renstra maupun Renop PS untuk mendorong dosen-dosen melanjutkan studi S3. Lembaga memfasilitasi pemenuhan syarat-syarat untuk studi lanjut S3, misal memfasilitasi beasiswa, pelatihan TOEFL, dan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor II Dekan/Direktur Wakil Dekan II Wakil Direktur II Ketua Jurusan Koorprodi Tim Restra/Renop Dosen
9.	<p>Masalah: Beberapa Prodi memiliki rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi standar (16 Sks)/ Masih ada dosen dengan rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi batas maksimal Akar Masalah: Jumlah dosen masih kurang</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan melakukan penghitungan kerja dosen pada awal semester. Lembaga melakukan identifikasi kecukupan dosen per kelompok keilmuan Pimpinan meakukan <i>mapping</i> kebutuhan dosen oleh Prodi. Lembaga melakukan rekrutmen dosen pada prodi yang masih kurang jumlah dosen. 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Dekan I Wakil Dekan II Wakil Direktur I Wakil Direktur II Kejur Koorprodi
10	<p>Masalah: Beberapa prodi memiliki rasio pembimbing TA dengan jumlah mahasiswa melebihi batas maksimal Akar Masalah : Jumlah dosen masih kurang</p>	Melibatkan dosen luar/ dosen lintas prodi yang sesuai dengan bidang ilmu untuk membimbing TA	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Dekan I Wakil Dekan II Wakil Direktur I Wakil Direktur II Kejur Koorprodi
B Bidang Penelitian			
11.	<p>Masalah : Prodi tidak memiliki Roadmap Penelitian. Akar Masalah: Lembaga belum mewajibkan prodi untuk menyusun Roadmap Penelitian dan dosen pada umumnya merujuk Roadmap Penelitian LPPM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pimpinan mewajibkan prodi untuk menyusun roadmap Penelitian. Pimpinan mensyaratkan pengajuan proposal Penelitian merujuk pada roadmap Penelitian prodi. Lembaga memfasilitasi prodi dalam penyusunan peta jalan PkM dalam bentuk FGD dan Workshop. 	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor I Ka LPPM Wakil Dekan Wakil Direktur I Pusat Penelitian Kejur Koorprodi
12.	Masalah : Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan penelitian yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi.	1. LPPM melibatkan prodi dalam proses monev pelaksanaan peta jalan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Rektor I Ka LPPM Wakil Dekan Wakil Direktur I

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
	dosen masih rendah. Akar Masalah: Belum ada kebijakan dari lembaga terkait kewajiban prodi dalam melakukan monev pelaksanaan peta jalan penelitian.	2. Melibatkan PJM dan GKM Fakultas/Pasca untuk turut serta dalam monev pelaksanaan monev peta jalan penelitian.	5. Pusat Penelitian 6. Pusat Penjaminan Mutu 7. Kejur 8. Koorprodi.
13.	Masalah : Belum adanya keterlibatan industri dalam pelaksanaan penelitian. Akar Masalah : Belum ada kewajiban melibatkan industri dalam penelitian.	1. Pimpinan membuat kebijakan untuk melibatkan industri dalam penyusunan proposal pada beberapa skim penelitian tertentu. 2. Lembaga memfasilitasi kerja sama dengan industry untuk dijadikan mitra dalam penelitiannya.	1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPM 3. Wakil Dekan 4. Wakil Direktur I 5. Pusat Penelitian 6. Pusat Penjaminan Mutu 7. Kepala BKK 8. Kejur 9. Koorprodi. 10. Dosen
C.	Bidang PkM		
14.	Masalah : Prodi tidak memiliki Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat. Akar Masalah: Lembaga belum mewajibkan prodi untuk menyusun Roadmap PkM dan dosen pada umumnya merujuk Roadmap PkM LPPM.	1. Pimpinan mewajibkan prodi untuk menyusun roadmap PkM. 2. Pimpinan mensyaratkan pengajuan proposal PkM merujuk pada roadmap PkM prodi. 3. Lembaga memfasilitasi prodi dalam penyusunan peta jalan PkM dalam bentuk FGD dan Workshop.	1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPM 3. Wakil Dekan 4. Wakil Direktur I 5. Pusat PkM 6. Kejur 7. Koorprodi
15.	Masalah : Belum tersedianya monev terhadap kesesuaian peta jalan PkM yang dirumuskan dengan penelitian yang ada di prodi. dosen masih rendah. Akar Masalah: Belum ada kebijakan dari lembaga terkait kewajiban prodi dalam melakukan monev pelaksanaan peta jalan PkM.	1. LPPM melibatkan prodi dalam proses monev pelaksanaan peta jalan penelitian. 2. Melibatkan PJM dan GKM Fakultas/Pasca untuk turut serta dalam monev pelaksanaan monev peta jalan penelitian.	1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPM 3. Wakil Dekan 4. Wakil Direktur I 5. Pusat P2M 6. Pusat Penjaminan Mutu 7. Kejur 8. Koorprodi
D.	Bidang Tambahan (Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, dan Luaran Mahasiswa)		
16.	Masalah: Siklus SPMI di fakultas atau prodi belum berjalan dengan optimal. Akar Masalah: Keberadaan GKM Fakultas/ Pasca/ Prodi belum berfungsi dengan baik dalam memenuhi 4 aspek, yaitu miliki dokumen legal, tersedia dokumen mutu, terlaksana siklus penjaminan mutu, dan ada bukti yang sahih pelaksanaannya.	1. Pimpinan mengaktifkan keberadaan unit pelaksana penjaminan mutu pada setiap Aras (universitas, fakultas, prodi). 2. Disusun tupoksi yang jelas antara GKM fakultas dan GKM Prodi. 3. GKM menyusun Dokumen SPMI, dan melakukan evaluasi secara berkala, khususnya pada bidang pembelajaran. 4. Pemberian grade pada sistem Remunerasi untuk pengelola GKM Fakulta/Prodi.	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Ka LPPPM 4. Wakil Dekan 1 5. Wakil Direktur 1 6. Kepala PJM 7. Ketua GKM 8. Tim Remunerasi 9. Ketua Jurusan 10. Koorprodi
17.	Masalah: Banyaknya kegiatan kerjasama tingkat internasional dalam	1. Lembaga memfasilitasi prodi untuk melakukan kerjasama	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Dekan I

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
	<p>1 tahun terakhir yang melibatkan prodi masih kurang. Akar Masalah: Kerjasama tingkat internasional belum banyak dan merata untuk semua prodi yang ada di Undiksha.</p>	<p>secara internasional sesuai keprodiaannya secara merata.</p> <p>2. Lembaga melalui BKK mengoptimalkan aktivitas kerjasama internasional yang sudah ada untuk prodi-prodi yang relevan.</p>	<p>3. Wakil Direktur I 4. Kepala BKK 5. Kejur 6. Koorprodi.</p>
18.	<p>Masalah: Persentase jumlah sks perkuliahan di luar prodi masih kurang. Akar Masalah: Kurikulum belum secara fleksibel mampu memfasilitasi konversi nilai dari aktivitas pembelajaran di luar prodi.</p>	<p>1. Mengkaji dan merevisi kurikulum agar mampu mengakomodasi secara fleksibel aktivitas MBKM mahasiswa untuk dikonversi ke mata kuliah.</p> <p>2. Pimpinan memotivasi prodi untuk memotivasi mahasiswanya dalam mengambil perkuliahan di luar program studi.</p> <p>3. Membuat sistem MBKM yang lebih terintegrasi untuk 8 aktivitas sampai mulai dari pendftaran sampai pengkonversian nilai.</p>	<p>1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPPM 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Direktur I 5. Pusat Penjaminan Mutu 6. Kepala BKK 7. Kepala UPT-TIK 8. Kejur 9. Koorprodi.</p>
19.	<p>Masalah: Belum dilakukannya pengukuran kepuasan layanan secara komprehensif. Akar Masalah: Keberadaan GKM Fakultas/ Pasca/ Prodi belum melaksanakan pengukuran kepuasan layanan prodi merujuk pada 6 kriteria yang ditetapkan pemerintah secara komprehensif.</p>	<p>1. Lembaga membuat kebijakan untuk mewajibkan unit terkait untuk melakukan pengukuran kepuasan layanan secara periodik.</p> <p>2. Mengoptimalkan peran GKM Fakultas/Pasca untuk melakukan pengukuran kepuasan layanan prodi/jurusan/fakultas yang komprehensif mencakup 6 kriteria dari pemerintah.</p> <p>3. Mengintegrasikan pengukuran layanan untuk lulusan dalam pelaksanaan <i>tracer study</i>.</p>	<p>1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Rektor III 4. Ka LPPPM 5. Wakil Dekan I 6. Wakil Direktur I 7. Pusat Penelitian 8. Pusat Penjaminan Mutu 9. Kepala UPT-PKMM 10. Ketua GKM 11. Kejur 12. Koorprodi.</p>
20.	<p>Masalah: Beberapa prodi memiliki mahasiswa yang sedikit, sehingga rasio tidak ideal. Akar Masalah : Prodi tergolong relatif baru.</p>	Sosialisasi terhadap keberadaan prodi perlu dioptimalkan, misal melalui media sosial, langsung ke sekolah, pemberianbeasiswa, dan sebagainya.	<p>1. Wakil Rektor I 2. Ka Biro AKPSI 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Dekan III 5. Wakil Direktur I 6. Kejur 7. Koorprodi</p>
21	<p>Masalah: Kelulusan tepat waktu mahasiswa pada beberapa prodi kurang dari standar. Akar Masalah : Kesadaran mahasiswa untuk menyelesaikan TA tepat waktu rendah.</p>	<p>1. Disusun jadwal penyusunan TA, pembimbingan, ujian proposal dan ujian hasil secara pasti.</p> <p>2. Dilakukan karantina bagi mahasiswa yang menyelesaikan TA lebih dari 6/8 semester.</p>	<p>1. Wakil Rektor I 1. Wakil Dekan I 2. Wakil Direktur I 3. Kejur 4. Koorprodi 5. Dosen Pembimbing.</p>
22	<p>Masalah: Prodi belum memiliki mahasiswa asing. Akar Masalah: Kurangnya kerjasama internasional terkait <i>student exchange</i></p>	1. Pimpinan mengadakan kerjasama internasional terkait <i>student exchange</i> lebih intensif.	<p>1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor III 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Direktur I</p>

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
	dan kurang siapnya prodi untuk memfasilitasi mahasiswa asing.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi lebih jauh untuk menyasar mahasiswa asing. 3. Mempersiapkan kurikulum, fasilitas, SDM, dan lainnya untuk mengakomodasi mahasiswa asing. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Wakil Dekan III 6. Ka LPPPM 7. Kejur 8. Koorprodi
23	<p>Masalah: Prodi belum mempunyai Renstra.</p> <p>Akar Masalah: Belum ada kebijakan untuk menyusun Renstra Prodi, dan hanya merujuk pada Renstra Fakultas/Universitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mewajibkan prodi menyusun Renstra. 2. Prodi membuat tim penyusun renstra yang merujuk pada renstra fakultas dan universitas. 3. Monitoring dan evaluasi penyusunan renstra prodi melalui GKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 4. Wakil Dekan I 2. Wakil Direktur I 3. Ka LPPPM 4. Kejur 5. Ketua GKM 6. Koorprodi
24	<p>Masalah: Jumlah luaran penelitian/PKM mahasiswa yang mempunyai HKI, teknologi tepat guna atau pun buku ber-ISBN masih rendah.</p> <p>Akar Masalah: Minimnya pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian/PkM dosen, serta ketidaktauan mahasiswa terkait luaran tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian/PkM. 2. Memberikan pelatihan kepada mahasiswa terkait publikasi luaran penelitian/PkM. 3. Mengimbau dosen untuk turut serta mencantumkan nama mahasiswa yang diajak berkolaborasi dalam publikasi. 4. Pimpinan membentuk tim percepatan publikasi mahasiswa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor III 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Direktur I 5. Wakil Dekan III 7. Ka LPPM 8. Kejur 9. Ketua GKM 10. Koorprodi
25	<p>Masalah: Prestasi mahasiswa akademik dan non akademik di tingkat Internasional masih kurang.</p> <p>Akar Masalah: Kurangnya partisipasi dan persiapan mahasiswa dalam menghadapi kempetisi akademik/non akademik di tingkat internasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan membentuk tim percepatan prestasi mahasiswa di tingkat internasional. 2. Pimpinan memfasilitasi pendanaan untuk mengikuti lomba tingkat internasional. 3. Memberikan reward khusus kepada mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional. 4. Melakukan sistem seleksi yang baik dan transparan. 5. Melakukan proses pembinaan yang intensif kepada mahasiswa. 6. Pemberian grade khusus pada dosen pembimbing untuk yang mahasiswanya berprestasi di tingkat internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II 2. Wakil Rektor III 3. Wakil Dekan II 4. Wakil Direktur II 5. Tim Remunerasi. 6. Kejur 7. Koorprodi
26.	<p>Masalah: Persentase mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya belum mencapai standar minimal.</p> <p>Akar Masalah: Keberadaan praktisi yang sesuai dengan keilmuan prodi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga melalui BKK memfasilitasi setiap prodi pilihan-pilihan praktisi yang mungkin sesuai dengan keprodiannya secara merata. 2. Mewajibkan prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Wakil Dekan I 3. Wakil Direktur I 4. Kepala BKK 5. Kejur 6. Koorprodi

No.	Hasil Audit	Rencana Tindak Lanjut	Penanggungjawab
	masih kurang dan tidak merata untuk setiap prodi.	melibatkan praktisi untuk beberapa mata kuliah yang mungkin setiap semesternya.	7. Dosen
27.	<p>Masalah: Karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba masih kurang.</p> <p>Akar Masalah: Hasil penelitian dari dosen belum sampai pada tahap digunakan oleh perusahaan, organisasi, BUMN, BUMD, dana tau organisasi Nirlaba.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga memfasilitasi peneliti untuk menggunakan hasil penelitiannya pada pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba. 2. Merancang dan melaksanakan FGD atau workshop yang mempertemukan peneliti dan pihak pengguna untuk sinkronisasi mulai dari penyusunan proposal dan/atau setelah hasil sudah didapatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Ka LPPM 3. Wakil Dekan I 4. Wakil Direktur I 5. Pusat Penelitian 6. Kepala BKK 7. Kejur 8. Koorprodi 9. Dosen

BAB IV

RENCANA PENINGKATAN STANDAR

Dalam pelaksanaan AMI-Akademik Undiksha Tahun 2024 juga mendapatkan standar yang telah mencapai dan/atau melampaui standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan konsep siklus PPEPP, standar-standar tersebut dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk tahun selanjutnya. Tabel 3, berikut adalah standar yang telah terlampaui, rencana peningkatan standarnya, deskripsi standar baru, dan penanggungjawab peningkatan standarnya sesuai dengan hasil RTM.

Tabel 3. Rencana Peningkatan Standar Hasil RTM

No.	Standar Yang Telah Terlampaui	Rencana Peningkatan Standar	Deskripsi Standar	Penanggungjawab
A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran				
1.	Program Studi wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 20% pada struktur kurikulumnya.	YA	Program Studi wajib memiliki perbandingan jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan praktik kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (termasuk KKN) dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan, minimal 25% pada struktur kurikulumnya.	WR I, Ka LPPPM, WD 1, Koorprodi.
2.	Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 sebagai berikut: a. Minimal 30% untuk program diploma, b. Minimal 50% untuk program sarjana, c. 100% untuk program magister dan doktor.	YA	Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan kualifikasi S3 sebagai berikut: a. Minimal 35% untuk program diploma, b. Minimal 60% untuk program sarjana, c. 100% untuk program magister dan doktor.	WR I, WR II, Ka LPPPM, WD 1, WD II, Kejur
3.	Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 70% .	YA	Program Studi menjamin bahwa persentase dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor minimal 75% .	WR I, WR II, Ka LPPPM, WD 1, WD II, Kejur
4.	Program Studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 80% .	YA	Program Studi menjamin bahwa persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap minimal 85% .	WR I, WR II, Ka LPPPM, WD 1, WD II, Kejur
B Bidang Penelitian				
5.	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana wajib	YA	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana	WR I, Ka LPPM, WD 1, Wadir I.

No.	Standar Yang Telah Terlampui	Rencana Peningkatan Standar	Deskripsi Standar	Penanggungjawab
	memastikan persentase penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) > 25%		wajib memastikan persentase penelitian Dosen Tetap Program Studi (DTPS) > 50%	
6.	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM wajib memastikan dana penelitian dosen rata rata lebih dari atau sama dengan 10 juta .	YA	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM wajib memastikan dana penelitian dosen rata rata lebih dari atau sama dengan 12,5 juta .	WR I, Ka LPPM, WD 1, Wadir I.
C	Bidang Pengabdian			
7.	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib memastikan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian yang dilaksanakan dosen, dengan presentase keterlibatan mahasiswa lebih 25% dari seluruh kegiatan pengabdian .	YA	Pimpinan Universitas, Ka LPPM, pimpinan Fakultas/ Pascasarjana wajib memastikan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian yang dilaksanakan dosen, dengan presentase keterlibatan mahasiswa lebih 50% dari seluruh kegiatan pengabdian .	WR I, Ka LPPM, WD 1, Wadir I.
8.	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM wajib memastikan dana pengabdian dosen rata rata > 5 juta	YA	Pimpinan Universitas, dan Ka LPPM wajib memastikan dana pengabdian dosen rata rata > 6 juta	WR I, Ka LPPM, WD 1, Wadir I.
D	Bidang Penunjang			
9.	Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa rasio "kegiatan" Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Program Studi dalam 1 tahun terakhir terhadap Jumlah dosen tetap (DT) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi (RK) ≥ 1	YA	Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa rasio "kegiatan" Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Program Studi dalam 1 tahun terakhir terhadap Jumlah dosen tetap (DT) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi (RK) ≥ 1,5	WR I, WD 1, Wadir I, Kejur, Koorprodi
10.	Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir: a. $\geq 3,25$ (D3); b. $\geq 3,25$ (S1); c. $\geq 3,5$ (S2); d. $\geq 3,5$ (S3)	YA	Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir: a. $\geq 3,5$ (D3); b. $\geq 3,4$ (S1); c. $\geq 3,6$ (S2); d. $\geq 3,6$ (S3)	WR I, WD 1, Wadir I, Kejur, Koorprodi
11.	Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa Persentase kelulusan tepat waktu untuk mahasiswa $\geq 50\%$	YA	Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib memastikan bahwa Persentase kelulusan tepat waktu untuk mahasiswa $\geq 60\%$	WR I, WD 1, Wadir I, Kejur, Koorprodi

BAB V

PENUTUP

Hal mendasar dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah *progress* tindak lanjut sebagai bentuk komitmen eksekutif dan seluruh sivitas akademika Undiksha dalam upaya mendukung peningkatan mutu yang tertuang pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Dokumen laporan RTM ini menjadi dokumen rekaman dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di FMIPA dan pada umumnya di Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan koordinasi dan kerjasama semua pihak, diharapkan pelaksanaan siklus PPEPP dapat berjalan dengan optimal. RTM menjadikan sebuah tolak ukur untuk mengimprove indikator kinerja pada sebuah Lembaga yang nantinya bermuara pada hasil akreditasi yaitu unggul.

DOKUMEN KEGIATAN RTM



